

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Koperasi Merah Putih Di Nagari Tanjung Beringin Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Tanfiziyah” yang disusun oleh Ezima Putri, NIM 1322027, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1448 H/2026M.

Pembahasan dalam skripsi ini dilatar belakangi pembentukan Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin sebagai kebijakan pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan melalui kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat. Secara ideal, pembentukan dan pengelolaan koperasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung tata kelola yang baik, meliputi pengelolaan kelembagaan, administrasi, permodalan, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin masih menghadapi beberapa kendala sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menganalisis kendala kelembagaan, administratif, dan teknis yang muncul dalam proses pembentukannya menurut perspektif fiqih siyasah tanfiziyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus koperasi, anggota koperasi, pemerintah nagari, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan Koperasi Merah Putih. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin pada dasarnya telah mengikuti ketentuan yang berlaku, melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), pembentukan kepengurusan, penyusunan AD/ART, dan pengesahan badan hukum koperasi. Pemerintah nagari juga memberikan fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala permodalan, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, administrasi, serta sosialisasi kepada masyarakat. Ditinjau dari perspektif fiqih siyasah tanfiziyah, pelaksanaan koperasi telah mencerminkan prinsip amanah, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan, tetapi masih diperlukan penguatan tata kelola, pengawasan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas pengelola agar koperasi dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.